

**BERITA ACARA EVALUASI
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS (PMPZI)
PADA KECAMATAN CANDI TAHUN 2026**

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi PMPZI yang telah dilaksanakan terhadap dokumen dan bukti dukung pada Lember Kerja Evaluasi (LKE) yang dikirimkan oleh Kecamatan Candi kepada Bagian Organisasi, Tim Penilai Internal Kabupaten Sidoarjo menyampaikan catatan penilaian sebagai berikut

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Nilai Minimum
A. PENGUNGKIT		60.00					
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	1.84	0.67	2.51	31.38%	Tidak Lulus
2	PENATAAN TATALAKSANA	7.00	1.49	0.50	1.99	28.36%	Tidak Lulus
3	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	10.00	2.46	0.75	3.21	32.09%	Tidak Lulus
4	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	2.05	2.83	4.88	48.80%	Tidak Lulus
5	PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	1.66	1.25	2.91	19.39%	Tidak Lulus
6	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	2.35	2.50	4.85	48.47%	Tidak Lulus
TOTAL PENGUNGKIT					20.34	33.90%	Tidak Lulus

B. HASIL		40.00					
L. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22.50			1.25	5.56%	OK
a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17.50			0.00	0.00%	Tidak Lulus
b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00			1.25	25.00%	Tidak Lulus
M. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17.50			0.00	0.00%	
	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17.50			0.00	0.00%	Tidak Lulus
TOTAL HASIL					1.25	3.13%	

NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS				21.59	Tidak Lulus
---------------------------------------	--	--	--	--------------	--------------------

CATATAN :

A. Komponen Pengungkit

1. Manajemen Perubahan

- Belum terdapat penjelasan dan evidence terkait mekanisme/prosedur pemilihan agen perubahan.
- Dalam dokumen rencana kerja ZI tidak diberikan uraian target dan waktu pelaksanaannya, serta nota dinas penyusunan rencana kerja masih tahun 2025, belum melampirkan dokumen terbaru untuk saat ini.
- Capture media sosial yang dilampirkan masih tahun 2023 sehingga belum menunjukkan implementasi pembangunan ZI tahun berjalan.
- Jika mengacu pada program pembangunan ZI yang dilaksanakan sejak th 2025, maka monev yang seharusnya dilakukan secara berkala hingga th 1 th 2026 tidak terlampir dalam bukti dukung
- Terkait dengan ditetapkannya agen perubahan dan kontribusinya terhadap unit kerja tidak dapat dilakukan penilaian karena link data dukung tidak dapat di akses

2. Penataan Tatalaksana

- Peta proses bisnis dan daftar SOP yang dilampirkan belum disesuaikan kondisi terkini dan relevansi pelaksanaan tahun berjalan, dimana tidak terdapat evaluasi dan tindak lanjut perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
- Sistem pengukuran kinerja dan pelayanan kepada publik telah menggunakan teknologi informasi, namun monitoring dan evaluasi yang dilakukan hanya pada TWI tahun 2025 saja.
- Belum terdapat SK penetapan PPID sebagai dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Demikian juga monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

- Data dukung terkait penempatan pegawai mengacu pada kebutuhan pegawai yang diusulkan serta monitoring dan evaluasi atas penempatan pegawai hasil rekrutmen yang dilampirkan tidak relevan
- Terkait dengan penilaian pola mutasi pegawai kurang memadai, karena data dukung yang dilampirkan tidak sesuai dengan kriteria yang dimaksud
- Unit kerja belum melampirkan dokumen Training Need Analysis, selain itu usulan diklat hingga daftar pegawai yang telah melaksanakan diklat sampai dengan tahun 2026 belum dilakukan
- Atas data dukung penetapan kinerja individu, dokumen SKP dan Evaluasi Kinerja Pegawai belum dilampirkan, dan di dalam bukti dukung terdapat IKJ Camat Gedangan dimana bukan merupakan unit kerja terkait

	- Aturan disiplin pegawai telah di implementasikan, dengan bukti dukung pemberian punishment yang dilaksanakan pada tahun 2025 - Data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai
4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	- Data dukung belum menunjukkan keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan dan reviu perencanaan kinerja - Penilaian pengelolaan akuntabilitas kinerja tidak dapat maksimal karena beberapa bukti dukung perencanaan kinerja tidak terlampir, misal PK dan IKU Tahun 2026
5 Penguatan Pengawasan	- Belum melakukan public campaign, serta laporan UPG dan benturan kepentingan belum melampirkan dokumen terkini (th 2025) - Belum terdapat bukti dukung terkait penyampaian informasi dan mengkomunikasikan SPI kepada seluruh pihak terkait - Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan, namun dokumen monev atas penanganan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti yang terlampir masih tahun 2025 - Penerapan Whistle Blowing System tidak dapat dilakukan penilaian karena tidak dilampirkan link bukti dukung - Belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama, serta pemenuhan dokumen pendukung lainnya kurang memadai
6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	- Reviu/perbaikan atas standar pelayanan telah dilakukan, namun tidak secara jelas mengupas permasalahan yang terjadi dan tidak memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat - Atas sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan belum dilampirkan SK Reward dan Punishment terbaru, dimana yang dilampirkan adalah SK tahun 2023 - Belum melampirkan SK tentang sarana layanan terpadu/terintegrasi di unit kerja - Atas implementasi pengelolaan pengaduan, terkait media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor hingga unit pengelola pengaduan tidak dapat dinilai karena tidak melampirkan bukti dukung. - Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang terlampir adalah periode 01 Januari 2025 - 31 Desember 2025, serta tidak terdapat tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat - Belum ada perbaikan yang dilaksanakan secara terus menerus terhadap teknologi informasi dalam membangun database pelayanan yang terintegrasi
B Komponen Hasil	
1 Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	- Untuk capaian kinerja utama sudah berorientasi hasil akan tetapi masih terdapat target kinerja utama yang tidak tercapai, yaitu nilai SAKIP capaian 99,54% pada periode TW I sd TW III th 2025
2 Pelayanan Publik yang Prima	- Unit kerja tidak melampirkan laporan SPKP dan SPAK terbaru periode TW I th 2026, dalam bukti dukung yang dilampirkan tahun 2025, sehingga tidak dapat dinilai.

Demikian Berita Acara Evaluasi ini dibuat dengan sebenarnya sebagai dokumentasi dan bahan tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan dapat menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Adapun hasil secara rinci atas evaluasi dimaksud, kami sampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi.